BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

a. Implementasi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta melalui website http://roops poldametro.blogspot.com, sejatinya belum cukup maksimal, karena berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diketahui bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta hanya berlangsung selama periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2017.

b. Diketahui kendala terhadap implementasi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta, dalam menyampaikan dokumen informasi publik diantaranya karena ketersediaan daya listrik di beberapa daerah tertentu yang tidak merata menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas Polda berupa pengiriman informasi dari PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tingkat Polsek dan Polres ke PID Divisi Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta selaku PID wilayah provinsi DKI Jakarta, masalah keterbatasan teknisi atau tenaga ahli yang mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, dalam pengelolaan dan perawatan peralatan elektronik, dan penyelenggaraan jaringan internet/daring, dan tata organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di satuan kerja Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta masih belum terstruktur dengan baik sehingga tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi masih sering terabaikan.

5.2 Saran

a. Kedepannya disarankan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta, agar dapat meningkatkan kinerja dalam penyediaan dokumen yang termasuk dalam kategori dokumen untuk publik Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna melaksanakan amanat peraturan

perundang-undangan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan.

b. Kedepannya disarankan guna meningkatkan dan memaksimalkan kinerja dalam penyediaan dokumen yang termasuk dalam kategori dokumen untuk publik, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta, serta instansi yang berada di bawahnya seperti Kepolisian Resort, dan Kepolisian sektor agar dapat segera diatasi, terutama terkait masalah keterbatasan teknisi atau tenaga ahli yang mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, dalam pengelolaan dan perawatan peralatan elektronik, dan penyelenggaraan jaringan internet/daring, dan tata organisasi Pengelola Informasi.

Penerapan Pasal.., Sakti Nugraha, Fakultas Hukum, 2022